

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agung Wardana, 2012, *Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi*, Lembaga Bantuan Hukum, Bali.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2023. Catatan Akhir Tahun 2023 Masyarakat Adat di Tahun Politik: di Tengah Hukum Represif dan Cengkraman Oligarki, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
- Amiruddin, A. dan Asikin, H. Zainal. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat, 2020, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Evendia, Malicia. Firmansyah, Ade Arif., Riananda, Martha. 2022. *Omnibus Law Cipta Kerja dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fandeli, Chafid. 2011, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadi, Sudharto P. 1997, *Aspek Sosial Amdal: Sejarah, Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Helmi, H. 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Ishaq, I. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, 2017, Bandung.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2021, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM Republik Indonesia, Jakarta.

Kurnia, Mahendra Putra. 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses bagi Pembentukan Perda yang Baik)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1975, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, Bandung.

Manik, Karden Eddy Sontang. 2003, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta.

Martosoewignyo, Sri Soemantri. 1987, *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung.

Mertokusumo, Soedikno. 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Soedikno. 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

S, Sirajuddin, F, Fatkhurohman, dan Z, Zulkarnain, 2016. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Setara Press, Malang.

Samad, Bahrin, 1983. *Manusia dalam Keresasian Lingkungan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Santoso, Taufik Iman. 2007, *Politik Hukum Amdal: Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Setara Press, Malang.

Sirajuddin, S. *et.al*, 2016, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, Setara Press, Malang.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemartono, R. M. Gatot P., 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemarwoto, Otto. 1997, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soemitro, Ronny Haniatjo. 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Suratmo, F. Gunawan. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Tony, Tom Korten. 1993, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan dalam Era Globalisasi*, CV Kloang Klede Jaya, Jakarta Timur.

United Nations, Report of the United Nations Conference on Environmental and Development Rio De Janeiro, 3-14 June 1992 1992 A/CONF.151/26

Wood, Christopher. 2002, *Environmental Impact Assessment: A Comparative Review*, Longman Group Limited, London.

Zein, Yahya Ahmad *et.al*, 2016, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

Artikel Jurnal

Angraini, Peggy Dian Septi Nur, A, Absori. Azhari, Aidul Fitriadi. “*Polemik Omnibuslaw: Izin dan Pengadaan Tanah Terhadap Resiko Bencana Kerusakan Lingkungan Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo*”, *Jatijajar Law Review*, 1, No 2, 2022.

Arawi, Fadia Amellia dan Atthahara, Haura. “*Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina*”, *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 4, No. 2, 2016.

Armeni, Chiara. “*Participation in Environmental Decision-making: Reflecting on Planning and Community Benefits for Major Wind Farms*”, *Journal of Environmental Law*, 28, 2016.

Armeni, Chiara. “*Participation in Environmental Decision-making: Reflecting on Planning and Community Benefits for Major Wind Farms*”, *Journal of Environmental Law*, 28, 2016.

Arni, Nurul. Nur, Aska. “*Resistensi Perempuan terhadap Kuasa di Balik Kasus Perampasan Ruang Hidup: Studi Ekofeminisme*”, *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, 1, No. 1, 2021.

Arnstein, Sherry R. “*A Ladder of Citizen Participation*”, *Journal of the American Institute of Planners*, 35, No. 4, 1969.

Azhara, Melisa Ayu dan Mardatillah, Siti Ruhana. “*Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/ Perppu Cipta Kerja*”, *JH Ius Quia Iustum*, 30, No. 2, 2023.

Haryono, Dodi. “*Metode Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*”, *Jurnal Konstitusi*, 18, No. 4, 2021.

Kertaningrum, Prita Hapsari dan Widayati, W. "Community Participation in Development of Environmental Impact Analysis Documents (AMDAL) Based on Arnstein Concept", *Law Development Journal*, 3, No. 2, 2021.

Lalu, Sabardi. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Yustisia*, 3, No. 1, 2014.

Lubis, Syakwan. "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik", *Jurnal Demokrasi*, 6, No. 1, 2007.

Mashuri, M. "Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi", *Jurnal Menara Riau*, 13, No. 2, 2014.

Mustaghfiroh, Umi. Nimah, Lailatul Khoirun. Sundusiyah, Asfiyatus. Addahlawi, Hilmi Alwi. "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia", *Bina Hukum Lingkungan* 4, No. 2, 2020.

Rachman, Cipta Indralestari dan Wijaya, Endra. "Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Legal Reasoning* 6, No. 1, 2023.

Sianturi, Yosia Viera Martua dan Deliarnoor, Nandang Alamsah. "Partisipasi Bermakna dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, 4, No. 3, 2024.

Syafiq, Muhammad. "Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Pelayanan Perizinan Memulai Usaha di Indonesia)", *Journal of Social Politics and Governance*, 1, No. 1, 2019.

Wibisana, Andri Gunawan. "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No. 2, 2018.

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", *Jurnal Supremasi*, 11, No. 2, 2021.

Wulandari, Sintiya Karina. Idrus, Muammar Alay. "Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB)", *Juridica*, 5, No. 1, 2023.

Abdurrahman, Maman. *Potensi Korupsi UU Cipta Kerja Kluster Pertanahan, Pertambangan dan Lingkungan*, Pidato, Seminar *Grand Corruption: Rancangan UU Cipta Kerja Kluster Tambang, Tanah dan Lingkungan pada Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) dan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK LPT)*, 4 November 2020.

Atmasasmita, Romli. *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pidato, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 1985.

Nursadi, Harsanto. *Pengaturan Baru Lingkungan pada UU CK*, Webinar Pengaturan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12 November 2020.

Sudijanto, Ary. *Regulasi Amdal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) terkait Persetujuan Lingkungan*, Seminar AMDAL Berdasarkan UU Cipta Kerja & Metodologi Persetujuan Teknis dalam AMDAL pada EcoEdu.id Pusat Pelatihan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, 22 Juli 2021.

Sudjianto, Ary. *Pengaturan Sektor Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja: Memastikan Amdal untuk Pelindungan Lingkungan*, Media Briefing UU Cipta Kerja tema Amdal bersama Direktur PDLUK KLHK, pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 14 Oktober 2020.

Internet

Aryo Bhawono, “Penolak PT Inmas Abadi Diusir saat Konsultasi Amdal”, <https://betahita.id/news/detail/8767/penolak-pt-inmas-abadi-diusir-saat-konsultasi-amdal.html?v=1717051770>, diakses pada 27 Juni 2024.

Bengkulu Interaktif, “Soal Amdal PT Inamas Abadi, Begini Penjelasan Akademisi”, <https://www.bengkuluinteraktif.com/soal-amdal-pt-inmas-abadi-begini-penjelasan-akademisi>, diakses pada 27 Juni 2024.

CNN Indonesia, “Amdal Bendungan Bener Klaim 85 Persen Warga Wadas Tak Tolak Tambang”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220216102443-20-759788/amdal-bendungan-bener-klaim-85-persen-warga-wadas-tak-tolak-tambang>, diakses pada 16 Juni 2024.

CNN Indonesia, “LBH Jogja: Warga Wadas Tolak Tambang, Bukan Bendungan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220210130030-20-757484/lbh-jogja-warga-wadas-tolak-tambang-bukan-bendungan>, diakses pada 16 Juni 2024.

CNN Indonesia, “Walhi Riau Kritik AMDAL PSN Rempang Eco City Baru Akan Disusun”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230929235718-20-1005425/walhi-riau-kritik-amdal-psn-rempang-eco-city-baru-akan-disusun>, diakses pada 1 Juni 2024.

DA, Ady Thea. “Guru Besar Ini Tegaskan Persetujuan Lingkungan Bisa Digugat ke PTUN”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-tegaskan-persetujuan-lingkungan-bisa-digugat-ke-ptun-lt60e6d7346d90d/>, diakses tanggal 25 Mei 2024.

DA, Ady Thea. “Guru Besar Ini Tegaskan Persetujuan Lingkungan Bisa Digugat ke PTUN”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-tegaskan-persetujuan-lingkungan-bisa-digugat-ke-ptun-lt60e6d7346d90d/>, diakses pada 25 Mei 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Dapat”, <https://kbbi.web.id/dapat>, diakses pada 26 Juni 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Partisipasi”, <https://kbbi.web.id/partisipasi>, diakses tanggal 29 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pemerhati”, <https://kbbi.web.id/pemerhati>, diakses pada 28 Juni 2024.

Kilas, “Gelombang Penolakan PT Inmas Abadi Kembali Memanas”, <https://www.kilas.co.id/gelombang-penolakan-pt-inmas-abadi-kembali-memanas/>, diakses pada 27 Juni 2024.

Kodir, Abdul. “Wadas dan Politik AMDAL” <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/06200011/wadas-dan-politik-amdal?page=all>, diakses pada 15 Mei 2024.

Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peringatan Hari Tani Nasional 2023”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-tani-nasional-2023>, diakses pada 28 Juni 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Penguatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18727&menu=2>, diakses pada 17 Juli 2024.

Mongabay, “Para Perempuan Pembela Lingkungan Minim Perlindungan”, <https://www.mongabay.co.id/2024/03/08/para-perempuan-pembela-lingkungan-minim-perlindungan/>, diakses pada 28 Juni 2024.

Muhid, Hendrik Khoirul. “Pulau Rempang Belum Selesai, Berikut Tanggapan Kritis Walhi, Ombudsman, KontraS, NCW, dan Komnas HAM”, <https://nasional.tempo.co/read/1778260/pulau-rempang-belum-selesai-berikut-tanggapan-kritis-walhi-ombudsman-kontras-ncw-dan-komnas-ham>, diakses pada 1 Juni 2024.

Putra, Roki Eka. “Legislator Nilai AMDAL PT Inmas Abadi Belum Diproses”, <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/253219/legislator-nilai-amdal-pt-inmas-abadi-belum-diproses>, diakses pada 27 Juni 2024.

R, Rahayu. “Rempang Eco City Tidak Punya Amdal, Walhi: Seperti Bikin Mie Instan”, https://bisnis.tempo.co/read/1777855/rem-pang-eco-city-tidak-punya-amdal-walhi-seperti-bikin-mie-instan?page_num=2, diakses pada 1 Juni 2024.

United Nation Conference on Environmental and Development, “Rio Declaration on Environment and Development”, <https://www.un.org/en/conferences/environment/riol1992>, diakses pada 29 Desember 2023.

WALHI Yogyakarta, “Bingkai Kepentingan Program Pembangunan dan Tambang Andesit di Wadas”, <https://walhi-jogja.or.id/index.php/2022/08/26/bingkai-kepentingan-program-pembangunan-dan-tambang-andesit-di-wadas/>, diakses pada 21 Juni 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

The Rio Declaration on Environment and Development 1992.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

The UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) 1998.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Indonesia, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 November 2021.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.